

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Bangsa Indonesia tidak mungkin selamanya mengandalkan sumber pendapatan negara dari sektor minyak dan gas saja, sebab sebagaimana kita ketahui bahwa sumber daya alam Indonesia saat ini mulai menipis dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahkan tidak dapat untuk diperbaharui lagi. Mengetahui hal tersebut maka pemerintah mengupayakan pengoptimalan sumber penerimaan negara dari sektor lain. Salah satu uasaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak. Manfaat pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah dan pembiayaan *publik investment*.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan Undang- Undang yang mengatur pemungutan PPN adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang- Undang ini lebih dikenal dengan sebutan UU PPN 1984 karena mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984 (Pasal 20 UU PPN 1984). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang datang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan pajak pertambahan nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari pajak pertambahan nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha yaitu orang pribadi atau badan, orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau kerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha yang telah memenuhi syarat dikenakan pajak pertambahan nilai wajib dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu, pengusaha yang apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak melebihi batasan pengusaha kecil yaitu Rp 600 juta (PMK-68/PMK.03/2010).kecuali pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, Seluruh pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud , dan ekspor jasa kena pajak

tanpa batasan penyerahan, kerja sama operasi dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerja sama operasi.

Dalam rangka melaksanakan aktivitas perdagangan, setiap pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak karena penyerahan BKP/JKP, atau karena impor. Faktur pajak dibuat oleh PKP penjual. Bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran dan bagi pembeli adalah sebagai bukti pajak masukan.

Faktur Pajak tidak perlu di buat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing yaitu, lembar ke-1 disampaikan kepada pembeli BKP atau penerima JKP, lembar ke-2 untuk arsip PKP yang menerbitkan faktur pajak.

Didalam faktur pajak juga terdapat nomor seri faktur pajak yang mana nomor ini diberikan guna mengaturnya pajak masukan dan pajak keluaran, nomor seri ini didapatkan dengan cara pengusaha mengajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat pengusaha mengukuhkan diri sebagai Pengusah Kena Pajak. Akan tetapi masih banyak pengusaha yang belum tahu cara memperoleh nomor seri faktur pajak tersebut.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa seorang pengusaha wajib membuat nomor seri faktur pajak, yang mana nomor ini sangat mempengaruhi transaksi yang dilakukan oleh pengusaha. sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengambil judul **“Tata Cara Pemberian Nomor**

Seri Faktur Pajak pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian tugas akhir ini dibuat dan disusun dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pemberian nomor faktur Pajak pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci dalam pemberian nomor faktur Pajak.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul tersebut makatujuan dari penelitian atas tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Tata CaraPemberian Nomor Seri Faktur Pajak Pada KPP Pratama pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk Mengetahui Kendala Kendala Dalam Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Yang Terjadi Di KPP Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak- pihak yang membutuhkan dan sebagai masukan, pertimbangan serta pedoman untuk mengetahui tata cara pemberian Nomor Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Memberikan masukan perbaikan kepada KPP Pratama Pangkalan Kerinci terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian nomor faktur pajak.
3. Digunakan sebagai dasar untuk melakukan kajian atau penulisan berikutnya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian tugas akhir ini akan dilakukan di KPP Pratama Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan tanggal 1 februari 2014 dan akan direncanakan selesai tanggal pada tanggal 30 Maret 2014.

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian tugas akhir ini meliputi data sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh Penulis melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan dan pegawai pada Seksi Pelayanan KPP Pratama Pangkalan Kerinci.

Data primer ini meliputi data untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2013

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang diperoleh di perpustakaan dan internet.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang menjadi permasalahan dalam Cara Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

b. Interview

Untuk pengumpulan data, Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan pokok pembahasan, yaitu Kepala Seksi Pelayanan dan pegawai pada Seksi Pelayanan KPP Pratama Pangkalan Kerinci.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari data atau dokumen yang terkait dengan mekanisme pemberian nomor faktur pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Pangkalan Kerinci.

1.4.5 Analisis Data

Data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian ini langsung dilakukan analisis. Analisis data tersebut meliputi analisis data secara kualitatif dan kuantitatif atas data primer dan data sekunder.

1.5 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum KPP Pratama Pangkalan Kerinci, struktur organisasi dan uraian tugas KPP Pratama Pangkalan Kerinci

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini akan diuraikan tentang definisi pajak, Fungsi pajak, jenis-jenis pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Azas Pemungutan pajak, pengertian PPN, subjek PPN, pengertian faktur pajak, jenis faktur pajak, saat pembuatan faktur pajak, format dan kode nomor faktur pajak, sanksi dan dasar hukum terkait faktur pajak, Pengertian Nomor Seri faktur pajak, pemberian nomor seri faktur pajak, manfaat pembuatan nomor seri faktur pajak, jangka waktu pembuatan nomor faktur pajak, pajak menurut islam, tentang tata

cara permohonan kode aktivasi dan *password* serta permintaan, pengembalian, dan pengawasan nomor seri faktur pajak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai hasil dari penelitian serta membuat kesimpulan dan saran.